



PAD Kalbar Tak Capai Target

Wagub Sampaikan LPJ APBD 2013

PONTIANAK, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar menggelar paparan penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 di Kantor DPRD Kalbar, Jl A Yani Pontianak, Jumat (22/8).

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyampaikan langsung laporan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsin.

Wagub mengatakan, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 bahwa, kepala daerah menyampaikan rencana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI.

Selain itu, jelas Wagub, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan kriteria yang digunakan BPK yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kemudian, kecukupan dalam pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Setelah itu, lanjutnya, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan ter-

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp 3,26 triliun. Sedangkan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 tercatat Rp 2,93 triliun.

CHRISTIANDY SANJAYA

Wakil Gubernur Kalbar

hadap peraturan perundang-undangan.

"Nah dari hasil pemeriksaan tersebut oleh BPK RI, dapat memberikan empat jenis opini yaitu, WTP, WDP, TW, dan tidak menyatakan pendapat. Namun hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI, Pemrov mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan," jelasnya.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2013, lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana tertuang dalam keuangan pemerintah provinsi Kalbar dalam anggaran 2013. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

"Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp 3,26 triliun. Sedangkan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 tercatat Rp 2,93 triliun. Dengan terjadi peningkatan sebesar Rp 3,29 miliar atau 11,23 persen," jelas-

liun, dengan realisasi Rp 1,34 triliun atau 97,91 persen.

PAD tersebut diperoleh dari pendapatan pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Ketua DPRD Kalbar Minsin menuturkan, angka-angka yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI.

"Mudah-mudahan pemba-

hasan ini bisa cepat, Sebab agenda kita masih dua lagi belum dibahas," tuturnya.

Menurutnya, kalau tidak cepat selesai dalam membahas hasil laporan ini, bisa mempengaruhi penilaian selanjutnya. "Tapi kita bersyukur dua tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalbar mendapatkan nilai yang baik, biarpun ada sedikit yang harus diperbaiki," ungkapnya. (rul)

Raih WTP

PEMROV Kalbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan hasil laporan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan penyusunan laporan keuangan Pemrov Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2013 telah sesuai dengan SAP.

Di mana telah diungkap secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

"Jadi BPK memberikan opini keuangan Pemrov Kalbar TA 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan," ujar Didi Budi saat menyampaikan laporan dalam sidang paripurna di DPRD Kalbar, Kamis (21/8).

Hal yang harus menjadi catatan bagi Pemrov Kalbar yakni lokasi, luas serta status tanah

untuk gedung dan bangunan. Dimana tidak secara material mempengaruhi penyajian aset tetap gedung dan bangunan pada laporan keuangan Pemrov Kalbar tahun 2013.

"Total neraca Pemrov Kalbar per 31 Desember 2013, menyajikan aset sebesar Rp 4,85 triliun. Dengan kewajiban sebesar Rp 106,73 triliun dan ekuitas sebesar Rp 4,74 triliun," jelasnya.

Laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 menyajikan APBD sebesar Rp 3,31 triliun. Dengan realisasi Rp 3,30 triliun, pembiayaan Netto dianggarkan Rp 162,04 miliar. Dengan realisasi seluruhnya 100 persen.

"Jadi jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Slipa) menjadi sebesar Rp 127,75," jelasnya.

Didi berharap, pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya fungsi anggaran. Serta melakukan pengawasan dalam pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 nanti. (rul)